BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung

4.1.1.1 Sejarah Pemerintah Kota Bandung

A. Zaman Penjajahan (Sebelum Tahun 1906)

Pada zaman penjajahan Belanda Indonesia disebut "Hindia Belanda", yang memegang kekuasaan di Hindia Belanda ialah seorang Gubernur Jenderal. Mr. Herman Willem Deandels adalah yang menjadi Gubernur Jenderal yang menjabat tahun 1808 dan tahun 1811. Gubernur inilah yang memerintahkan untuk membuat jalan raya sepanjang pulau Jawa dari anyer sampai Panarukan. Jalan raya ini melintasi Wilayah Kabupaten Bandung dan Kotamadya Bandung. Pusat Pemerintah Kota Bandung pada waktu itu terletak di kota Krapyak (Citereup) yaitu kurang lebih 9 km sebelah Selatan dari pusat kota Bandung. Letak kota itu oleh Gubernur Jenderal Deandels dipandang dari segi komunikasi, stategi, keamanan dan pertahanan tidak memenuhi kepentingannya. Maka diperintahkan kepada Bupati Bandung, ketika itu Wiranatakusumah III untuk memindahkan Ibukota Kabupaten dari kota Krapyak ke sebelah utaranya pada poros jalan raya dekat dengan sungai Cikapundung.

Pembangunan Ibukota Kabupaten Bandung dilaksanakan dibawah pimpinan Bupati Wiranatakusumah III tanggal 25 Mei 1810. Pertama-tama dibangun gedung menghadap ke Alun-alun yang selesai pada 18 Januari 1881. Secara resmi

dipindahkannya Ibukota Kabupaten Bandung pada 25 Mei 1881. Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten ternyata makin lama makin ramai, sehingga tahun 1862 oleh pemerintah Kolonial Belanda dijadi

kan tempat kedudukan Residen Priangan, yang sebelumnya berkedudukan di Kota Cianjur.

Pada waktu R.A. Martanegara diangkat menjadi Bupati (1893) kota Bndung mengalami perubahan yang penting. Rumah-rumah yang beratap alang-alang diganti dengan genting. Selain itu juga memperhatikan perekonomian rakyat. Kota Bandung semakin lama semakin maju dan ramai. Terutama setelah adanya penghubung kereta api. Dengan keputusan Gubernur Jenderal pada 29 Pebruari 1906, kota Bandung dibentuk sebagai daerah Otonom *"Gemeente"* yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 April 1906. Saat itulah yang dijadikan Hari Jadi Kota Bandung.

B. Zaman Pemerintahan Belanda (1906-1942)

Dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 21 Pebruari 1906, kota Bandung dibentuk sebagai *"Gemeemte"*. Menurut pasal 7 SK tersebut *"Gemeente Bandung"* itu diadakan suatu Dewan Haminte *(Gemeenteraad)* yang terdiri dari 11 anggota, yaitu 8 orang Bangsa Eropa, 2 orang Bangsa Indonesia Asli dan 1 orang Bangsa Timur Asing. Badan tersebut diketuai oleh kepala Pemerintahan setempat *(Hoofd van Plaatselijk Bestuur)* di Bandung, yang dalam jabatan it uterus berlaku dari tahun 1906 sampai 1 Juli 1917, pada waktu itu pertama kalinya disebut *"Burgemeester van Bandung"* (Walikota Bandung).

Adanya penyusunan kembali pemerintahan, maka dengan SK Gubernur Jenderal pada 27 Agustus 1926 No. 3x (Staadsblaad 1926 N0. 369) sebagai pelaksanaan dari *wet vande staads inriching van Ned Indie* dinyatakan berlaku untuk "Gemeente Bandung". Maka sejak 1 Oktober 1926 ketentuan dalam Stanadgemeentte Ordonantie berlaku untuk Gemeente Bandung. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 dari Staadgemeente Ordinantie, alat kelengkapan atau lembaga pemerintahan *"Staadgemeente Bandung",* yaitu *Raad (Stadsgemeente), College van Burgemeente en Wethouders* dan *Burgemester.*

C. Zanan Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada waktu pendudukan Jepang yaitu pada 9 Maret 1942 sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Standsgemeenterad dan College van Burgemeester en Wethouders tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pemerintah kota Bandung seluruhnya dijalankan oleh seorang Sityo (Walikota) yang diangkat oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

Pemerintah umum berada dalam tangan Sityo dan dalam Kota, Bupati Bandung tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Wilayah kota dibagi dalam empat kewedanaan yang masing-masing dikepalai oleh Wedana. Keempat kewedanaan, yaitu Bandung utara, Bandung Timur, Bandung Selatan dan Bandung Barat. Kewedanaan itu selanjutnya dibagi dalam beberaapa Desa yang dikepalai oleh Kutyo yang semuanya berjumlah 18 orang. Lurah-lurah dan pegawai Desa dijadikan Pegawai Negeri.

D. Zaman Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI maka Pemerintahan Kota Bandung dipinpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh suatu Komite Nasional. Komite Nasional ditugaskan untuk mengurus keamanan dan menyusun usaha perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Keadaan itu terus berlangsung sampai bulan April 1946, pada waktu itu seluruh kota Bandung diduduki oleh Tentara Sekutu. Seama kota Bandung diduduki Tentara Sekutu dan selanjutnya sampai terbentuknya *"Voorloopige Federal Regering voor Indonesia"* dulu (*Stadsdsblaad,* 1948 No.62) alat-alat pemerintah *Staadsgemeente* dalam kota Bandung sebagai *Staadsgemeente* dalam kota Bandung sebagai *Staadsgemeente de jure* tidak pernah dihapuskan. Keadaan tidak berubah setelah terbentuknya pemerintah Pra Federal.

Dengan SK Residen Kepala Pemerintah Priangan di Bandung pada 28 Juni 1948 No. 146 berdasarkan Peraturan kekuasaan Militer yang ditetapkan oleh Recomba Jawa Barat pada 6 Januari 1946 No. Recwj. 17/jiz Jo. tertanggal 20 Pebruari 1948 No. Recwj.20/jiz mulai 1 Juli 1948 untuk daerah *Staadsgemeente* Bandung dibentuk badan yang diserahi tugas kewajiban *College van Burgemeester en Wethouders* menurut *Staadsgemeente Ordonantie.* Badan itu dinamakan *Tijdelijke College van degelijks Bestuur* terdiri dari 11 anggota, yaitu 5 orang Bangsa Indonesia, 2 orang Bangsa Tionghoa, seorang Bangsa Arab dan 3 orang Bangsa Belanda, kesemuanya diangkat dengan SK tersebut. Kepala ketuan Badan tersebut diserahi tugas kewajiban Walikota menurut *Staadsgemeente Ordonantie.*kewajiban dijalankan oleh Residen K.P.S. Priangan . Pada 1 Juli 1948 alat-alat Staadsgemeente

Bandug dibangun kembali, berlaku sampai 24 Pebruari 1949 pada waktu mana SK Residen K.P.S. Priangan tersebut di cabut kembali.

Berhubung dengan penggabungan wilayah Negara Pasundan ke Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1950 dengan Surat Keputusan Presiden RIS No. 113 tahun 1950, maka telah dikeluarkan Instruksi Pemerintah No. 1 tahun 1950 mengenai pembubaran semua Dewan Perwakilam Rakyat Daerah yaitu Kabupaten dan Kota. Untuk menghindari kevakuman kekuasaan, maka dengan surat keputusan Gebernur Jawa Barat tertanggal 2 Juli 1950 No. 2/Uh/GD-8/50, ditetapkan bahwa :

- Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Haminte Kota dilakukan oleh Residen yang bersangkutan, untuk Haminte Bandung oleh Residen Priangan.
- Kekuasaan Dewan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, untuk Haminte bandung oleh WaliKota Bandung.

Keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 4 April 1950 dan dengan demikian berakhirlah hidupnya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan badan Pengurus Harian tersebut. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Bandung, yang didasarkan kepada Peratiran Pemerintah RI No. 39 tahun 1950. Pemilihan tersebut dilakukan dibawah pimpinan panitia Penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang diketuai

oleh Walikota Sendiri. Pada tanggal 6 Nopember 1950 diangkat 5 orang anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara bersama-sama dengan Walikota Kepala Daerah Kota Besar Bandung yang merupakan Dewan Pemerintahan Daerah sementara.

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah di Indonesia, maka perundang-undang lainnya mengenai Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut pasal 2 ayat 1 UU No 1957 bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam Daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, yaitu Daerah swantara I, Daerah swantara Tingkat II dan Daerah swanrata Tingkat III.

Menurut pasal 2 dari UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, bahwa wilayah Negara RI terbagi habis dalam daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkat, yaitu Provinsi atau DT.I, Kabupaten atau DT.II dan Kecamatan atau DT.III.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974 tentang pelaksanaan dari UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah bahwa sebutan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikepalai oleh seorang Walikotamadya. Sedangkan menurut pasal 13 ayat 2 UU No. 5 tahun 1974, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Tingkat II Bandung Periode Tahun 1993 hingga sekarang (Kep.Mendagri No. 28 Th. 1992) adalah sebagai berikut :

a. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
b. Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
c. Sekretaris Kotamadya/Daerah.
d. Pembantu Walikotamadya.
e. BP 7.
f. Bappeda.
g. Itwilkodya.
h. Asisten Tata Praja.
i. Asisten Administrasi Pembangunan.
j. Asisten Administrasi.
k. Camat.
l. Kamtib.
m. Dinas Otonomi : (DPU, DTK, DPB, Dinas pertamanan, Dinas Kebakaran, Dipenda, Disperum, DKK, DKG, DKHP, DPTP, Diparda, Dinas Pemakaman, Dinas P dan K, Dinas Perikanan, Dinas Pasar).
n. Unit Peelaksana Daerah : (Bapedalda, BPP, R.M Babakan Siliwangi).
o. Perusahaan Daerah : (PDAM, PD Kebersihan, PD Bank Pasar).
p. Kantor (Catatan Sipil, Sospol, Bengdes)
q. Bagian.

r. Kecamatan.

s. Kelurahan.

4.1.1.3 Job Description

a. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

b. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang kesehatan.

c. Dinas Tata Kota

Dinas tata kota yang sekarang berganti nama menjadi dinas pekerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian urusan Pemerintah Daerah, di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan.

d. Badan Perencanaan Daerah

Badan perencanaan daerah mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan yang meliputi bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial dan budaya.

e. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

f. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup yang sekarang berubah nama menjadi kantor lingkungan hidup mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

g. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Capil

Dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial, dan tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial, tenaga kerja, dan ketransmigrasian.

h. BPMPPKB

Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pelayanan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

i. Dinas Perekonomian dan Koperasi

Dinas koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, kebudayaan, dan pariwisata.

j. Dinas Penanaman Modal

Dinas penanaman modal yang sekarang berganti nama menjadi kantor penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal.

k. Badan Kesatuan Bangsa

Badan kesatuan bangsa yang sekarang berganti nama menjadi kantor kesatuan bangsa mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa.

l. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

m. Kecamatan Cimahi Utara

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

n. Kecamatan Cimahi Selatan

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

o. Kantor Kepegawaian Daerah

Kantor kepegawaian daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan menyusun pelaksanaan kebijakan

daerah dalam bidang kepegawaian daerah yang meliputi bidang perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan dan mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

4.1.1.4 Aktivitas Pemerintah Kota Bandung

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan lingkup kesekretariatan, yaitu :
   - Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
   - Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
   - Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaran tugas-tugas Bidang;
   - Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
   - Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
   - Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

b. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dengan lingkup perencanan tata ruang, sarana dan prasarana, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
- Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; dan
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana

c. Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi, yaitu :

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah;
- penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;
- pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan

- pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.

d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
- Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; dan
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

e. Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan pemerintahan, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;

- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian, pengembangan dan statistik, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
- Pelaksanaan dan pengkordinasian penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik.

g. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penanaman modal, yaitu :

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
- Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.2.1.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Data Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar Pendapatan Asli Daerah Budi S. Purnomo sebagai berikut :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2009:34)

Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah ditambah dengan hasil retribusi daerah ditambah dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditambahkan dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan indikator tersebut dan data yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah, informasi mengenai besarnya pendapatan asli daerah yang diukur dengan rasio yaitu jumlah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama tahun 2001 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

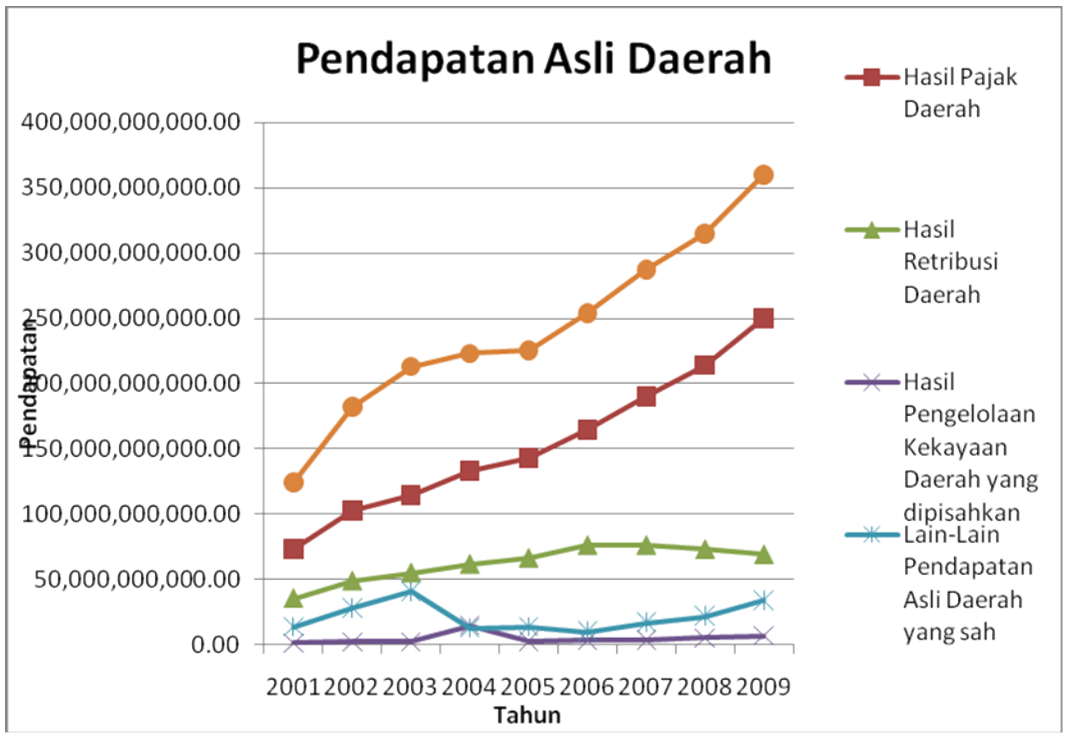
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001-2009

Tahun	Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	%
2001	73,583,061,471.10	35,484,409,612.00	1,501,769,951.29	13,415,244,714.84	123,984,485,749.23	126,782,348,151,29	97.79
2002	103,153,173,907.92	48,760,223,699.50	2,236,810,668.00	27,914,030,268.60	182,064,238,544.02	197,699,717,568.00	92.09
2003	114,983,791,861.00	55,029,885,021.10	2,060,481,417.61	40,955,303,562.54	213,029,461,862.25	229,749,164,455,00	92.72
2004	133,554,985,454.00	61,634,485,823.75	14,854,648,731.00	12,865,821,944.00	222,909,941,952.75	215,114,010,650,00	103.62
2005	143,107,822,781.00	66,280,333,390.00	2,552,953,482.00	13,655,328,960.00	225,596,438,613.00	213,100,251,482,00	105.86
2006	164,781,409,646.00	76,015,059,933.00	3,155,367,154.00	9,931,082,809.87	253,882,919,542.87	238,305,532,000.00	106.57
2007	190,496,238,611.00	76,099,329,030.00	3,763,740,190.00	16,890,226,213.93	287,249,534,044.93	281,981.582,738,35	101,87
2008	214,433,400,986.00	72,857,118,264.30	5,447,893,079.00	21,888,743,083.00	314,627,155,412.30	338,376,369,006.00	92.98
2009	250,338,673,104.00	68,912,741,347.00	7,136,408,109.00	33,764,805,130.00	360,152,627,690.00	369,127,442,213,08	97.57

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (data diolah)

Dari tabel 4.1 tersebut, untuk mempermudah dalam memahami perkembangan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah, maka penulis menggambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 4.1

Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001-2009

Hasil yang diperoleh dari grafik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 sebesar Rp 123.984.485.749,23 hasil yang diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 73.583.061.471,10 hasil retribusi daerah sebesar Rp 35.484.409.612,00 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 1.501.769.951,29 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 13.415.244.714,84. Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 126,782,348,151,29 dan persentase pencapaian sebesar 97.79%. Dengan demikian pendapatan asli daerah

pada tahun 2001 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

2. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2002 sebesar Rp 182.064.238.544.02 hasil yang diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 103.153.173.907,92 hasil retribusi daerah sebesar Rp 48.760.223.699,50 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.236.810.668,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 27.914.030.268,60. Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 197.699.,717.568.00 dan persentase pencapaian sebesar 92.09% mengalami penurunan sebesar 5.7% dari tahun 2001 yaitu sebesar 97.79% hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2002 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
3. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 sebesar Rp 213.029.461.862.25 hasil yang diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 114.983.791.861.00 hasil retribusi daerah sebesar Rp 55.029.885.021.10 hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.060.481.417.61 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 40.955.303.562.54. Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 229.749.164.455,00 dan persentase pencapaian sebesar 92.72% mengalami kenaikan sebesar 0.69% dari tahun 2002 yaitu sebesar 92.09%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2003 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

4. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 sebesar Rp 222.909.941.952.75 hasil yang diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 133.554.985.454.00 hasil retribusi daerah sebesar Rp 61.634.485.823.75 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 14.854.648.731.00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 12.865.821.944.00. Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 215.114.010.650,00 dan persentase pencapaian sebesar 103.62% mengalami kenaikan sebesar 10.9% dari tahun 2003 yaitu sebesar 92.72%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2004 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan

hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

5. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 sebesar Rp 225.596.438.613.00 hasil yang diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 143.107.822.781.00 hasil retribusi daerah sebesar Rp 66.280.333.390.00 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.552.953.482.00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 13.655.328.960.00. Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 213.100.251.482,00 dan persentase pencapaian sebesar 105.86% mengalami kenaikan sebesar 2.24% dari tahun 2004 yaitu sebesar 103.62%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2005 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
6. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 sebesar Rp 253.882.919.542.87 hasil yang diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 164.781.409.646.00 hasil retribusi daerah sebesar Rp 76.015.059.933.00 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3.155.367.154.00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 9.931.082.809.87. Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 238.305.532.000.00 dan persentase pencapaian sebesar 106.57% mengalami kenaikan sebesar 0.71% dari

tahun 2005 yaitu sebesar 105.86%. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2006 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

7. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2007 sebesar Rp 287.249.534.044.93 hasil yang diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 190.496.238.611.00 hasil retribusi daerah sebesar Rp 76.099.329.030.00 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3.763.740.190.00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 16.890.226.213.93. Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 281.981.582.738.35 dan persentase pencapaian sebesar 101,87% mengalami penurunan sebesar 4.7% dari tahun 2006 yaitu sebesar 106.57%, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2007 meskipun mengalami penururan akan tetapi masih efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

8. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2008 sebesar Rp 314.627.155.412.30 hasil yang diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 214.433.400.986.00 hasil retribusi daerah sebesar Rp 72.857.118.264.30 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.447.893.079.00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 21.888.743.083.00. Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 338.376.369.006.00 dan persentase pencapaian sebesar 92.98% mengalami penurunan sebesar 8.89% dari tahun 2007 yaitu sebesar 101.87%, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2008 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
9. Pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2009 sebesar Rp 250.338.673.104.00 hasil yang diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 68.912.741.347.00 hasil retribusi daerah sebesar Rp 68.912.741.347.00 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 7.136.408.109.00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 33.764.805.130.00. Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 369.127.442.213.08 dan persentase pencapaian sebesar 97.57% mengalami kenaikan sebesar 4.59% dari tahun 2008 yaitu sebesar 92.98%. Dengan demikian meskipun mengalami

kenaikan akan tetapi pendapatan asli daerah pada tahun 2009 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

4.2.1.2 Analisis Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bandung

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya Dana Alokasi Umum menurut Budi S. Purnomo adalah berikut :

"Dana yang bersumber dari pendapatan APBN atau pemerintah pusat".

(2009:37)

Dana alokasi umum diperoleh dari pemerintah pusat, yaitu besarnya dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah. Data dana alokasi umum diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan indikator tersebut dan data yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah, informasi mengenai besarnya dana alokasi umum yang diukur dengan rasio yaitu besarnya dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat selama tahun 2001 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

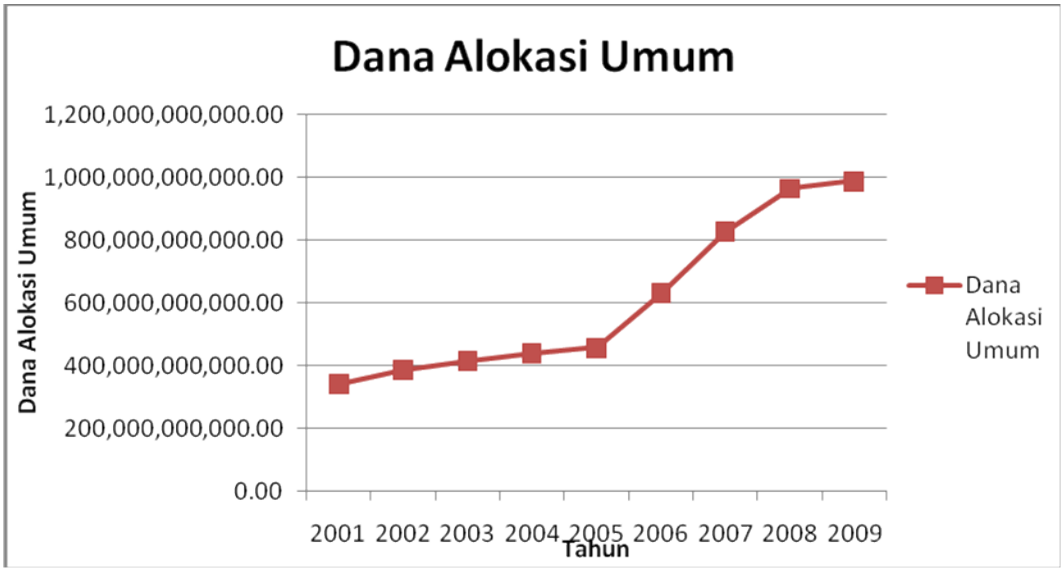
Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001-2009

Tahun	Realisasi DAU	Anggaran DAU	%
2001	341,618,150,032.00	341,620,000,000,00	99.99
2002	388,260,000,000.00	338,260,000,000.00	100
2003	416,680,000,000.00	416,680,000,000.00	100
2004	439,689,469,000.00	434,500,000,000.00	101.19
2005	458,072,000,000.00	458,070,000,000.00	100
2006	632,379,000,000.00	632,379,000,000.00	100
2007	828,294,700,000.00	827,608,000,000.00	100.08
2008	965,518,566,800.00	965,516,430,000.00	100
2009	989,233,620,000.00	989,245,660,000.00	100

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (data diolah)

Perkembanagn Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kota Bandung sepanjang tahun 2001-2009 dapat digambarkan pada grafik berikut :



Gambar 4.2

Grafik Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001-2009

Hasil yang diperoleh dari grafik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 sebesar Rp 341.618.150.032.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 341.620.000.000,00 dengan persentase pencapaian sebesar 99.99%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2001 tidak efektif karena kurang dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

2. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2002 sebesar Rp 388.260.000.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 338.260.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% mengalani kenaikan sebesar 0.01% dari tahun 2001 sebesar 99.99%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2002 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
3. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 sebesar Rp 416.680.000.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 416.680.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2002. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2003 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
4. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 sebesar Rp 439.689.469.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar

Rp 434.500.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 101.19% mengalami kenaikan sebesar 1.19% dari tahun 2003 sebesar 100%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2004 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

5. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 sebesar Rp 458.072.000.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 458.070.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% mengalami penurunan sebesar 1.19% dari tahun 2004 sebesar 101.19%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2005 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
6. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 sebesar Rp 632.379.000.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 632.379.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2005. Dengan demikian

pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2006 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

7. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2007 sebesar Rp 828.294.700.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 827.608.000.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100.08% mengalami kenaikan sebesar 0.08% dari tahun 2006 sebesar 100%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2007 efektif karena lebih dari 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.
8. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2008 sebesar Rp 965.518.566.800.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 965.516.430.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% mengalami penurunan sebesar 0.08% dari tahun 2007 sebesar 100%. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2008 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

9. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 sebesar Rp 989.233.620.000.00, sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 989.245.660.000.00 dengan persentase pencapaian sebesar 100% tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2009. Dengan demikian pengelolaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2009 efektif berimbang karena sama dengan 100%. Efektif adalah ukuran keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan dari program atau kegiatan dan hasil yang dicapai dari suatu program. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.

4.2.1.3 Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

Belanja daerah melipuati semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Data belanja daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar BelanjaDaerah menurut Nunuy Nur Afiah sebagai berikut :

" a. belanja langsung
b. belanja tidak langsung"

(2009:15)

Belanja daerah diperoleh dari jumlah belanja langsung di tambahkan dengan belanja tidak langsung. Berdasarkan indikator tersebut dan data yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah, informasi mengenai besarnya belanja daerah yang diukur dengan rasio yaitu dari jumlah belanja langsung dan jumlah belanja tidak langsung selama tahun 2001 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

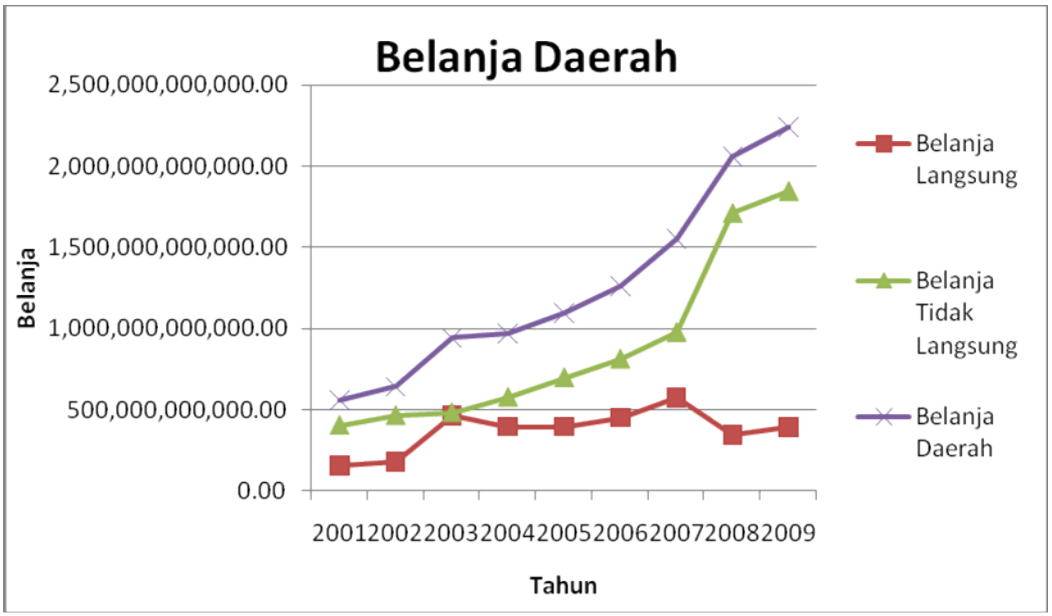
Tahun 2001-2009

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	%
2001	157,636,327,454.89	404,631,841,177.68	562,268,168,632.57	571,650,654,699.57	98.36
2002	181,148,470,711.50	465,441,876,568.50	646,590,347,280.00	655,847,528,819.14	98.59
2003	463,163,252,359.98	482,660,870,177.60	945,824,122,537.58	1,010,900,333,988.41	93.56
2004	396,533,381,816.00	578,490,326,336.70	975,023,708,152.70	1,046,425,772,243.00	93.18
2005	397,033,287,106.30	699,558,994,462.00	1,096,592,281,568.30	1,157,011,927,060.00	94.78
2006	451,776,153,891.00	814,271,048,147.00	1,266,047,202,038.00	1,375,191,194,000.00	92.06
2007	574,120,075,124.00	978,766,539,044.00	1,552,886,614,168.00	1,786,806,337,918.53	86.91

2008	345,160,822,373.00	1,713,759,759,664.55	2,058,920,582,037.55	2,260,409,191,308.53	91.09
2009	390,988,308,073.00	1,849,751,687,078.00	2,240,739,995,151.00	2,498,896,793,515.08	89.67

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (data diolah)

Perkembanagn Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung sepanjang tahun 2001-2009 dapat digambarkan pada grafik berikut :



Gambar 4.3
Grafik Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2001-2009

Hasil yang diperoleh dari grafik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 sebesar Rp 562.268.168.632.57 hasil yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp 157.636.327.454.89 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 404.631.841.177.68. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 571.650.654.699.57 dengan persentase sebesar 98.36%. Dengan demikian belanja daerah pada tahun 2001

tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

2. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2002 sebesar Rp 646.590.347.280.00 hasil yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp 181.148.470.711.50 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 465.441,876.568.50. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 655.847.528.819.14 dengan persentase sebesar 98.59% mengalami kenaikan sebesar 0.23% dari tahun 2001 sebesar 98.36%. Dengan demikian belanja daerah pada tahun 2002 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.
3. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 sebesar Rp 945.824.122.537.58 hasil yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp 463.163.252.359.98 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 482.660.870.177.60. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.010.900.333.988.41 dengan

persentase sebesar 93.56% mengalami penurunan sebesar 5.03% dari tahun 2002 sebesar 98.59%, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian belanja daerah pada tahun 2003 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

4. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 sebesar Rp 975.023.708.152.70 hasil yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp 396.533.381.816.00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 578.490.326.336.70. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.046.425.772.243.00 dengan persentase sebesar 93.18% mengalami penurunan sebesar 0.38% dari tahun 2003 sebesar 93.56%, yang diakibatkan oleh menurunnya belanja langsung. Dengan demikian belanja daerah pada tahun 2004 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.
5. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 sebesar Rp 397.033.287.106.30 hasil yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp

699.558.994.462.00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1.096.592.281.568.30. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.157.011.927.060.00 dengan persentase sebesar 94.78% mengalami kenaikan sebesar 1.6% dari tahun 2004 sebesar 93.18%. Dengan demikian belanja daerah pada tahun 2005 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

6. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 sebesar Rp 1.266.047.202.038.00 hasil yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp 451.776.153.891.00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 814.271.048.147.00. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.375.191.194.000.00 dengan persentase sebesar 92.06% mengalami penurunan sebesar 2.72% dari tahun 2005 sebesar 94.78%, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dan perencanaan. Dengan demikian belanja daerah pada tahun 2006 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

7. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2007 sebesar Rp 1,552,886,614,168.00 hasil yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp 574,120,075,124.00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 978.766.539.044.00. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.786.806.337.918.53 dengan persentase sebesar 86.91% mengalami penurunan sebesar 5.15% dari tahun 2006 sebesar 92.06%, hal ini terjadi karena kurang stabilnya perekonomian di Indonesia yang disebabkan oleh krisis keuangan global yang terjadi di AS. Dengan demikian belanja daerah pada tahun 2007 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.
8. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2008 sebesar Rp 2.058.920.582.037.55 hasil yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp 345.160.822.373.00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1.713.759.759.664.55. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 2.260.409.191.308.53 dengan persentase sebesar 91.09% mengalami kenaikan sebesar 4.18% dari tahun 2007 sebesar 86.91%. Dengan demikian belanja daerah pada tahun 2008 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan

biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

9. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2009 sebesar Rp 2.240.739.995.151.00 hasil yang diperoleh dari belanja langsung sebesar Rp 390.988.308.073.00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1.849.751.687.078.00. Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 2.498.896.793.515.08 dengan persentase sebesar 89.67% mengalami penurunan sebesar 1.42% dari tahun 2008 sebesar 91.09%, hal ini di sebabkan oleh belum stabilnya perekonomian di Indonesia yang diakibatkan oleh krisis keuangan global yang terjadi di AS. Dengan demikian belanja daerah pada tahun 2009 tidak ekonomis karena kurang dari 100%. Ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

4.2.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

1. Analisis Statistik

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah maka dilakukan pengujian statistik baik secara parsial maupun simultan. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, analisis regresi linier berganda, pengujian uji asumsi klasik, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software *SPSS 15 for windows* dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini :

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melakukan prediksi, perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah sebagai variabel X_1 dan dana alokasi umum sebagai variabel X_2 dan satu variabel dependen yaitu belanja daerah.

Sehingga dapat diketahui dan dibuktikan sejauh mana hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Dalam perhitungannya penulis menggunakan dua cara yaitu manual dan komputerisasi. Cara perhitungan

komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *SPSS 15 for windows.* Berikut ini perhitungan regresi linier berganda secara manual menggunakan persamaan regresi berganda, yaitu sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2}$$

Nilai a, b_1 dan b_2 dapat di cari dengan menyelesaikan persamaan dengan rumus berikut:

$$\sum y = na + b_1\sum X_1 + b_2\sum X_2$$

$$\sum X_1 y = a\sum X_1 + b_1\sum X_1^2 + b_2\sum X_1X_2$$

$$\sum X_2 y = a\sum X_2 + b_1\sum X_1X_2 + b_2\sum X_2^2$$

Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, nilai-nilai yang diperlukan dalam perhitungan diperoleh melalui perhitungan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Data untuk perhitungan analisis Regresi X dan Y

Tahun	X_1	X_2	Y	X_1Y
2001	123,984,485,749.29	341,618,150,032.00	562,268,168,632.57	$6.971252971X10^{22}$
2002	182,064,238,544.02	388,260,000,000.00	646,590,348,280.00	$1.177209794x10^{23}$
2003	213,029,461,862.25	416,680,000,000.00	945,824,122,537.58	$2.014884038x10^{23}$
2004	222,909,941,952.75	439,689,469,000.00	975,023,708,152.70	$2.173424781x10^{23}$
2005	225,596,438,613.00	458,072,000,000.00	1,096,592,281,568.30	$2.473873132x10^{23}$
2006	253,882,919,542.87	632,379,000,000.00	1,266,047,202,038.00	$3.112724431x10^{23}$

2007	287,249,534,044.93	828,294,700,000.00	1,552,886,614,168.00	$4.460659565x10^{23}$
2008	314,627,155,412.30	965,518,566,800.00	2,058,920,582,037.55	$6.477923259x10^{23}$
2009	360,152,627,690.00	989,233,620,000.00	2,240,739,995,151.00	$8.070083972x10^{23}$
∑	**2,183,496,803,411.41**	**5,459,745,505,832.00**	**11,344,893,022,565.70**	$5.701526804x10^{23}$

……..

Tahun	**X_2Y**	**X_1X_2**	**X_1^2**	**X_2^2**	**Y^2**
2001	$1.920810115x10^{23}$	$4.235535065x10^{22}$	$1.53721527x10^{22}$	$1.167029604x10^{23}$	$3.161454934x10^{23}$
2002	$2.510451686x10^{23}$	$7.068826125x10^{22}$	$3.314738695x10^{22}$	$1.507458276x10^{23}$	$4.180790784x10^{23}$
2003	$3.941059953x10^{23}$	$8.876511616x10^{22}$	$4.538155162x10^{22}$	$1.736222224x10^{23}$	$8.945832707x10^{23}$
2004	$4.287076565x10^{23}$	$9.801115401x^{22}$	$4.968884222x10^{22}$	$1.933268291x10^{23}$	$9.506712314x10^{23}$
2005	$5.023182196x10^{23}$	$1.033394118x10^{23}$	$5.089375311x10^{22}$	$2.098299571x10^{23}$	$1.202514631x10^{24}$
2006	$8.006216635x10^{23}$	$1.605502267x10^{23}$	$6.445653683x10^{22}$	$3.999031996x10^{23}$	$1.602875517x10^{24}$
2007	$1.286247752x10^{24}$	$2.379272666x10^{23}$	$8.25122948x10^{22}$	$6.8607211x10^{23}$	$2.411456836x10^{24}$
2008	$1.987926049x10^{24}$	$3.037783601x10^{23}$	$9.899024692x10^{22}$	$9.322261028x10^{23}$	$4.239153963x10^{24}$
2009	$2.216615336x10^{24}$	$3.562750876x10^{23}$	$1.297099152x10^{23}$	$9.785831549x10^{23}$	5.020915725x1024
∑	**$8.059668853x10^{24}$**	**$1.461690235x10^{27}$**	$5.701526804x10^{23}$	**$3.841012364x10^{24}$**	**$1.705639574x10^{25}$**

Dari tabel di atas dapat di ketahui:

$\sum X_1$ = 2,183,496,803,411.41/ $2.183496803x10^{12}$

$\sum X_2$ = 5,459,745,505,832.00/$5.459745505x10^{12}$

$\sum Y$ = 11,344,893,022,565.70/ $1.113489302x10^{13}$

$\sum X_1Y$ = $5.701526804x10^{23}$

$\sum X_2Y$ = $8.059668853x10^{24}$

$\sum X_1X_2 = 1.461690235x10^{27}$

$\sum X_1^2 = 5.701526804x10^{23}$

$\sum X_2^2 = 3.841012364x10^{24}$

$\sum Y^2 = 1.705639574x10^{25}$

Model regressi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada belanja daerah yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana alkasi umum). Berdasarkan Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi dengan *SPSS 15 for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Zero-order
1	(Constant)	-4E+011	2E+011		-2.595	.041	
	PAD	3.765	1.496	.456	2.517	.045	.970
	DAU	1.250	.414	.548	3.023	.023	.975

a. Dependent Variable: BD

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.6 maka dapat dibentuk model prediksi variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y= -400,000,000,000+3.765X_1+1.250X_2}$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa :

- Nilai konstanta (a) sebesar -400.000.000.000 menunjukkan nilai rata-rata Belanja Daerah di Pemerintah Kota Bandung apabila pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) tidak dilaksankan dengan baik.
- Koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) bertanda positif sebesar 3.765, artinya apabila pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel dana alokasi umum (DAU) tidak mengalami perubahan, maka belanja daerah akan naik sebesar 3.765. Hal itu berarti, apabila pendapatan asli daerah (PAD) meningkat sedangkan alokasi umum (DAU) tetap maka belanja daerah akan meningkat.
- Koefisien regresi dana alokasi umum (DAU) bertanda positif sebesar 1.250, artinya apabila dana alokasi umum (DAU) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mengalami perubahan, maka belanja daerah akan meningkat sebesar 1.250. Hal itu berarti, apabila dana alokasi umum (DAU) meningkat sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) tetap maka belanja daerah akan meningkat.

1) Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi di analisa lebih lanjut, ada beberapa asumsi yang harus diuji guna mengetahui apakah kesimpulan dari regresi tersebut tidak biasa, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi. Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas tersebut

diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (sembilan tahun pengamatan).

a) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan ujisatu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

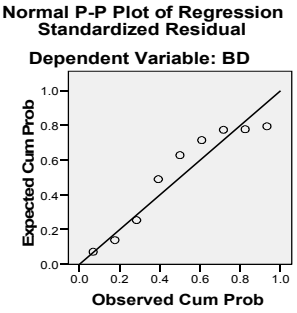
		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0002272
	Std. Deviation	90473517958
Most Extreme Differences	Absolute	.203
	Positive	.171
	Negative	-.203
Kolmogorov-Smirnov Z		.608
Asymp. Sig. (2-tailed)		.854

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat grafik *normal P Plot of Regression Statistic*. Bila titik-titik menyebar di

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.4

Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Dari grafik normal P-Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal.

b) Uji Asumsi Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF <10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya, jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.121	8.286
	DAU	.121	8.286

a. Dependent Variable: BD

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel independen pendapatan asli daerah (PAD) (X_1) dan dana alokasi umum (DAU) (X_2) > 0,10 dan begitu juga dengan nilai VIFnya <10. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multokolinearitas dalam model regresinya yang diperoleh.

c) Uji Asumsi Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.8 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien regressi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error).

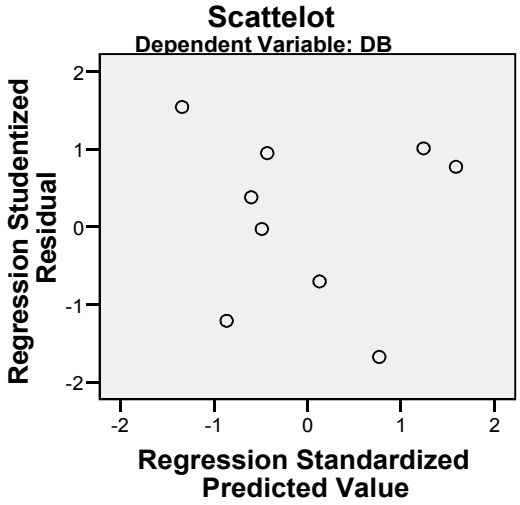
Tabel 4.8
Hasil Pengujian Asumsi Heterokedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	absolut_error	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	9
	PAD	Correlation Coefficient	-.067
		Sig. (2-tailed)	.865
		N	9
	DAU	Correlation Coefficient	-.067
		Sig. (2-tailed)	.865
		N	9

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (tidak terdapat heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukan oleh hasil regresi X_1 terhadap nilai absolut dari residual (error) tidak signifikan pada level 5%. Diperoleh nilai signifikansi untuk PAD sebesar 0,865 lebih besar dari 0,05 dan untuk X_2 sebesar 0,865 lebih besar dari 0,05 sebagai batas tingkat kekeliruan.

Cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SDRESID). Jika ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini :



Gambar 4.5

Grafik Uji Heterokedastisitas

Diperoleh titik-titik data tersebar di atas dan dibawah 0, sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang diperoleh.

d) Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regressi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regressi.

Tabel 4.9
Nilai Durbin-Watson Untuk Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988[a]	.976	.968	1.045E+011	2.335

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: DB

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 2,335, sementara dari tabel Durbin-Watson pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel bebas = 2 dan jumlah pengamatan n = 9 diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 0,629 dan batas atasnya (d_U) = 1,662. Karena nilai d_U (1,662) lebih kecil dari pada Durbin-Watson (2,335) dan lebih kecil dari pada 4-d_U (2.338), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

b. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah digunakan analisis korelasi pearson (*product*). Korelasi pearson (*product*) digunakan sesuai dengan jenis data skala penelitian yang digunakan yaitu rasio.

Berikutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) dengan belanja daerah. Melalui korelasi parsial akan dicari besar pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap belanja daerah ketika variabel independen lainnya dianggap konstan. Berikut perhitungan secara parsial yaitu sebagai berikut:

1. Koefisien korelasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja daerah diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$r_{X_1Y} = \frac{n \times \sum X_1 Y - \left(\sum X_1\right) \times \left(\sum Y\right)}{\sqrt{\left(n \times \sum X_1^2 - \left(\sum X_1\right)^2\right)\left(n \times \sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)}}$$

$$= \frac{2{,}911977645 \text{x} 10^{24}}{3{,}003415273 \text{x} 10^{24}}$$

= 0,970 **(Pembulatan)**

2. Koefisien korelasi dana alokasi umum (DAU) dengan belanja daerah diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$r_{X_2Y} = \frac{n \times \sum X_2 Y - \left(\sum X_2\right) \times \left(\sum Y\right)}{\sqrt{\left(n \times \sum X_2^2 - \left(\sum X_2\right)^2\right)\left(n \times \sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)}}$$

$$= \frac{1{,}059679099 \text{x} 10^{25}}{1{,}086553212 \text{x} 10^{25}}$$

= 0,975 **(Pembulatan)**

3. Koefisien korelasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan dana alokasi umum (DAU) diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$r_{X_1X_2} = \frac{n \times \sum X_1 X_2 - \left(\sum X_1\right) \times \left(\sum X_2\right)}{\sqrt{\left(n \times \sum X_1^2 - \left(\sum X_1\right)^2\right)\left(n \times \sum X_2^2 - \left(\sum X_2\right)^2\right)}}$$

$$= \frac{1{,}233875256 \times 10^{24}}{1{,}315824057 \times 10^{24}}$$

= 0,938 **(Pembulatan)**

Perhitungan tersebut sesuai dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu dengan menggunakan *SPSS 15 for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Korelasi

Correlations

		PAD	DAU	BD
PAD	Pearson Correlation	1	.938**	.970**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	9	9	9
DAU	Pearson Correlation	.938**	1	.975**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	9	9	9
BD	Pearson Correlation	.970**	.975**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	9	9	9

**. Correlation is significant at the 0.01 level

Dari hasil perhitungan, diperoleh korelasi pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah (DAU) (r_{X_1Y}) sebesar 0,970 dengan arah positif. Hasil perhitungan nilai korelasi dana alokasi umum (DAU) dan belanja daerah (r_{X_2Y}) diperoleh sebesar 0,975 dengan arah positif. Hasil perhitungan nilai korelasi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) ($r_{X_1X_2}$) diperoleh sebesar 0,970.

Menggunakan nilai koefisien kolerasi antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja daerah, dana alokasi umum (DAU) dengan belanja daerah,

pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (PAD) yang telah diketahui, dapat diperoleh nilai korelasi parsial antar variabel melalui perhitungan sebagai berikut:

1. Korelasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja daerah apabila dana alokasi umum (DAU) dianggap konstan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$r_{yx_1 \cdot x_2} = \frac{r_{yx_1} - r_{yx_2} r_{x_1 x_2}}{\sqrt{\left(1 - r_{yx_2}^2\right)\left(1 - r_{x_1 x_2}^2\right)}}$$

$$= \frac{0{,}055}{0{,}076681158}$$

= 0,717 (**Pembulatan)**

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 15 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Korelasi Parsial
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah apabila Dana Alokasi Umum (DAU) Konstan

Correlations

Control Variables			PAD	BD
DAU	PAD	Correlation	1.000	.717
		Significance (2-tailed)	.	.045
		df	0	6
	BD	Correlation	.717	1.000
		Significance (2-tailed)	.045	.
		df	6	0

Hasil korelasi parsial pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah apabila dana alokasi umum (DAU) konstan diperoleh sebesar 0,717 dengan arah positif. Korelasi pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah masuk dalam ketegori kuat. Dengan arah positif, menunjukkan arah hubungan antarapendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah berbanding lurus, berarti jika semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) maka belanja daerah diprediksi akan semakin besar.

Besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung ketika dana alokasi umum (DAU) tidak berubah adalah $(0,717)^2 \times 100\% = 51,41\%$.

2. Korelasi dana alokasi umum (DAU) dengan belanja daerah apabila pendapatan asli daerah (PAD) dianggap tidak berubah (Konstan) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$r_{yx_2 \cdot x_1} = \frac{r_{yx_2} - r_{yx_1} r_{x_1 x_2}}{\sqrt{\left(1 - r_{yx_1}^2\right)\left(1 - r_{x_1 x_2}^2\right)}}$$

$$= \frac{0,06514}{0,084268734}$$

$$= 0,777 \textbf{ (Pembulatan)}$$

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 15 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Korelasi Parsial
Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Daerah apabila Pendapatan Asli Daerah Konstan

Correlations

Control Variables			DAU	BD
PAD	DAU	Correlation	1.000	.777
		Significance (2-tailed)	.	.023
		df	0	6
	BD	Correlation	.777	1.000
		Significance (2-tailed)	.023	.
		df	6	0

Hasil korelasi parsial dana alokasi umum (DAU) dan belanja daerah apabila pendapatan asli daerah (PAD) konstan diperoleh sebesar 0,777 dengan arah positif. Korelasi dana alokasi umum (DAU) dan belanja daerah masuk dalam ketegori kuat. Dengan arah positif berarti bahwa hubungan antara dana alokasi umum (DAU) dan belanja daerah berbanding lurus, jadi semakin dana alokasi umum (DAU) maka belanja daerah diprediksi akan semakin tinggi.

Besar pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung ketika pendapatan asli daerah (PAD) tidak berubah adalah $(0,777)^2 \times 100\% = 60,37\%$.

3. Korelasi secara simultan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) Terhadap belanja daerah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}}$$

$$= \sqrt{0{,}976214254}$$

$$= 0{,}988 \textbf{ (Pembulatan)}$$

Hasil perhitungan korelasi simultan yang diperoleh melalui *SPSS 15 for windows* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Korelasi Simultan

Pendapatan Aslli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Daerah

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988[a]	.976	.968	1.045E+011

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: DB

Hasil perhitungan menghasilkan korelasi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) dengan belanja daerah yaitu 0,988. Hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) dengan belanja daerah yang diperoleh berbanding lurus (bersifat positif) yang berarti jika semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) maka belanja daerah akan tinggi. Nilai korelasi sebesar 0,988 berada diantara 0,800 hingga 1,000 yang tergolong dalam kriteria korelasi sangat kuat. Jadi secara simultan kedua variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan belanja daerah.

c. Koefisiensi Determinasi Parsial

Koefisien determinasi parsial di hitung untuk mengetahui besar pengaruh masing-masing variabel independent (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependent (belanja daerah). Koefisien determinasi parsial dihitung dari hasil perkalian *standardized coefficients* dengan *zero-order correlations* (Landau & Everitt, 2004;110) yang terdapat pada tabel 4.5.

Koefisien determinasi parsial dari variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah = 0.456 x 0.970 = 0.442 atau 44.2%. artinya secara parsial Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 44.2% terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

Selanjutnya, koefisien determinasi parsial dari variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah = 0.548 x 0.975 = 0.534 atau 53.4 %. artinya secara parsial Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 53.4% terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

d. Koefisiensi Determinasi Simultan

Nilai korelasi *r* hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y), digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus dari koefisien determinasi adalah sebagai

berikut:Koefisiensi Determinasi (KD) yang menunjukkan besarnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah diperoleh menggunakan rumus berikut :

$Kd = R^2 \times 100\ \%$

$Kd = (09887)^2 \times 100\ \%$

$Kd = 0{,}976 \times 100\%$

$Kd = 97{,}6\%$

Sedangkan hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS 15* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988[a]	.976	.968	1.045E+011

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: DB

Dari Tabel 4.13 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,976. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 97,6% dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) dalam menjelaskan/ mempengaruhi belanja daerah Pemerintah Kota Bandung, berarti jika semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) maka belanja daerah di prediksi akan semakin tinggi. Sedangkan sisanya 2,4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak

diteliti dalam penelitian ini, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan transfer pemerintah pusat.

e. Uji Hipotesis

a) Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Pada pengujian koefisien regresi secara parsial akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2.447 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 6 pada pengujian dua pihak.

i. Uji hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

1. Hipotesis Penelitian

   Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

   Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

   Ha : Terdapat pengaruh yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

2. Hipotesis Statistik

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji dua pihak (*two tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (H_0) : $\beta = 0$ dan hipotesis alternatifnya (H_a) : $\beta \neq 0$.

Ho : $\beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Darah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

Ha : $\beta_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Darah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

3. Nilai t_{hitung} dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

$$t = r_{YX_1.X_2} \times \sqrt{\frac{n-k-1}{1-r^2_{YX_1.X_2}}}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah sebagai berikut:

$$t = 0.938 \text{ x} \sqrt{\frac{9-2-1}{(1-0.938)^2}}$$

$$t = 0.938 \text{ x} \sqrt{\frac{6}{(1-(0.120156)}}$$

$$t = 0.938 \text{ X} \sqrt{49.93308439}$$

$t = 0.938 \text{ X } 7.006479029$

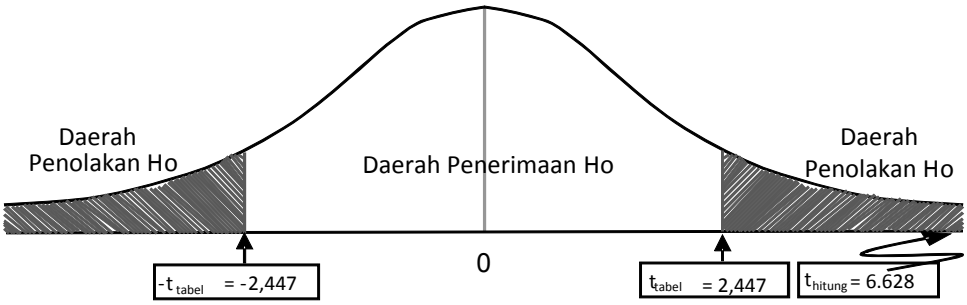
t = 6.628 **(Pembulatan)**

4. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

   Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

   Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

   Berdasarkan nilai yang diperoleh nilai t_{hitung} variabel pendapatan asli daerah sebesar 6.628. Karena nilai t_{hitung} (6.628) lebih besar dari t_{tabel} (2.447) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_1 dan menerima Ha_1. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.6

Grafik Daerah penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

(Pendapatan Asli Daerah)

5. Pengambilan keputusan hipotesis

   Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung telah terbukti melalui pengujian hipotesis. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% (α =0.05), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa H_0 ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli darah terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

   Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah secara parsial adalah 44.2%, artinya sebesar 44.2% kenaikan belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung dapat dijelaskan oleh peningkatan pendapatan asli daerah ketika dana alokasi umum tetap. Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja

daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar bahwa Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja.

ii. Uji hipotesis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

1. Hipotesis Penelitian

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

2. Hipotesis Statistik

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji dua pihak (*two tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (H_0) : $\beta = 0$ dan hipotesis alternatifnya (H_a) : $\beta \neq 0$.

Ho : $\beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

Ha : $\beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

3. Nilai t dapat di cari dengan persamaan sebagai berikut:

$$t_1 = r_{1y}\sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r_{1y}^2)}}$$

Untuk mengetahui dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah sebagai berikut:

$$t = 0.777 \text{ X } \sqrt{\frac{9-2-1}{(1-0.777)^2}}$$

$$t = 0.777 \text{ X } \sqrt{\frac{6}{(1-(0.396271)}}$$

$$t = 0.777 \text{ X } \sqrt{29.78085545}$$

$$t = 0.777 \text{ X } (3.891163502)$$

t = 3.023 **(Pembulatan)**

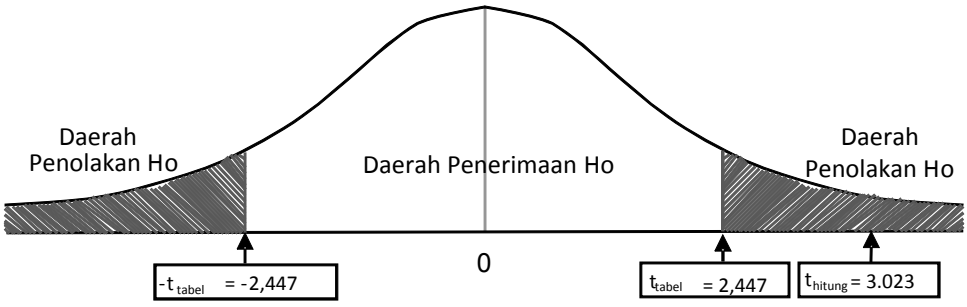
4. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Berdasarkan nilai yang diperoleh nilai t_{hitung} variabel dana alokasi umum 3.023. Karena nilai t_{hitung} (3.023) lebih besar dari t_{tabel} (2.447) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_2 dan menerima Ha_2.

Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.7
Grafik Daerah penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial (Dana Alokasi Umum)

5. Pengambilan keputusan hipotesis

   Hipotesis yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung telah terbukti melalui pengujian hipotesis. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% (α=0.05), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa H_0 ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari dana alokasi umum terhadap bealanja daerah Pemerintah Kota Bandung.

   Besarnya pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah secara parsial adalah 53.4%, artinya sebesar 53.4% kenaikan belanja daerah pada

Pemerintah Kota Bandung dapat dijelaskan oleh peningkatan dana alokasi umum ketika pendapatan asli daerah tetap. Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah yang menyatakan bahwa Beberapa daerah mengeluhkan bagian DAU yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah. Idealnya penerimaan daerah yang berasal dari Dana Bagian daerah atas PPh Perseorangan, PPB, BPHTB, dan penerimaan SDA, serta Dana Alokasi Umum sudah cukup untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai.

b) Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan bertujuan untuk membuktikan apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung 2001-2009 sebagai berikut:

a. Hipotesis Statistik

Ho :$\beta_{12} = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

Ha : $\beta_{12} \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

b. .Nilai F_{hitung} dapat di cari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana:

R = koefisien kolerasi ganda

K = jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$F = \frac{(0.988)^2/2}{(1 - (0.988)^2)/(9 - 2 - 1)}$$

$$F = \frac{0.976144/2}{(1 - 0.976144)/6}$$

$$F = \frac{0.488072}{0.003976}$$

$F =$ 123.245 (**Pembulatan)**

Perhitungan tersebut di atas juga sama dengan perhitungan secara komputerisasi dengan SPSS 15 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.15

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.7E+024	2	1.345E+024	123.245	.000[a]
	Residual	6.5E+022	6	1.091E+022		
	Total	2.8E+024	8			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: DB

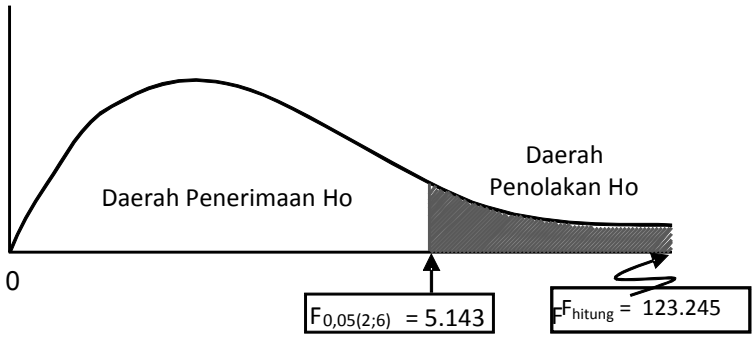
c. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel berdasarkan tingkat signifikansi (α) =5% dan derajat kebebasan pembilang= k dan derajat kebebasan penyebut = n-k-1. Kriteria pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

- H_0 = F hitung > F tabel maka H_0 ditolak
- Ha = F hitung < F tabel maka H_a ditolak

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} hasil pengolahan data sebesar 123.245 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas (2;6) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 5.143. Karena F_{hitung} (123.245) lebih besar dari F_{tabel} (5.143) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) Ho ditolak sehingga Ha diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan

bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung periode 2001-2009.



Gambar 4.8

Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan

d. Pengambilan keputusan hipotesis

Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung telah terbukti melalui pengujian hipotesis. Melalui uji-F dengan tingkat kekeliruan 5% (α=0.05), diperoleh hasil bahwa H_0 ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama terhadap belanja daerah. Besarnya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah adalah sebesar 97.6%. Artinya 97.6% perubahan belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli

daerah dan dana alokasi umm, sedangkan sisanya sebesar 3.4% dipengaruhi faktor lain, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan transfer pemerintah provinsi.